PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Radar Hari: Senin Tanggal: 14 November 2022 Halaman: 1

MINTA WAKTU: Suasana kawasan Jalan Perwakilan saat akhir pekan, Jogja, kemarin (13/11). Kelompok pedagang yang tergabung dalam Forum Komunikasi dan Koordinasi Perwakilan (FKKP) meminta perpanjangan waktu pengosongan kawasan itu karena akan dibangun Jogja Planning Gallery (JPG) oleh Pemprov DIJ.

Pedagang Klaim Tak Ada Penolakan Relokasi

Dukung Program JPG, Minta Perpanjangan Waktu Pengosongan

JOGJA, *Radar Jogja* - Belum pernah mendapat informasi relokasi, Forum Komunikasi dan Koordinasi Perwakilan (FKPP) mengklarifikasi statemen Pj Wali Kota Jogja Sumadi. Mereka menyatakan tidak benar menolak pindah dari Jalan Perwakilan ke Pasar Klitikan. Sosialisasi pengosongan bangunan baru pertama dilakukan. Itu pun tak ada informasi relokasi yang disampaikan ›

▸ *Baca Pedagang... Hal 11*

- Malioboro nantinya akan benar-benar diterapkan sebagai kawasan pedesterian.
- Arus lalu lintas akan dialihkan di sirip-sirip kawasan Malioboro.

GRAFIS: HERPIN KARTUN/RADAR JOGJA

Pedagang Klaim Tak Ada Penolakan Relokasi

Sambungan dari hal 1

Ketua FKPP Adi Kusuma Putra Suryawan mengatakan, selama ini pedagang tidak pernah melakukan penolakan atas rencana pengosongan bangunan dan pemindahan ke tempat baru untuk rencana program pemerintah. Namun, sejauh ini justru informasi relokasi belum tersampaikan ke mereka. Baru hanya sosialisasi, itu pun tahap pertama Rabu lalu (26/10) di Kemantren Danurejan.

"Mengenai statemen Bapak Pj Wali Kota di media mengenai klaim bahwa waktu sosialisasi sudah lama dilakukan dan relokasi yang telah ditawarkan pemkot, saya pastikan tidak benar," katanya kepada *Radar Jogja* kemarin (13/11).

Adi menjelaskan, dalam undangan sosialisasi pertama diterima pada 24 Oktober 2022 dengan nomor surat 005/2511 oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Kota Jogja. Sosialisasi dilakukan baru pertama itu dilakukan, meski di undangan sosialisasi tertera perihal sosialisasi pengosongan kios dan relokasi. Tetapi saat forum berlangsung, Dispertaru sama sekali tidak membicarakan soal masalah relokasi.

"Bahkan saat kami bertanya mengenai relokasi, dengan tegas Dispertaru mengatakan sampai saat itu mereka tidak ditugaskan untuk memberi kompensasi apa pun. Dan mereka katanya tidak dikasih *dawuh* memberikan relokasi dan tidak mempunyai kewenangan relokasi itu. Sangat saya sayangkan, kenapa tahu-tahu Pj wali kota mendapat informasi seperti itu," ujarnya.

Sejatinya, belasan pedagang kios di Jalan Perwakilan itu tidak ada penolakan sama sekali atas program pemerintah untuk keperluan pembangunan Jogja Planning Gallery (JPG) di kawasan kantor DPRD DIJ. Jalan Perwakilan yang ada di selatan gedung dewan, jadi penopang jalan masuk menuju ke sana.

Pihaknya sangat mendukung dan mendorong program pemerintah itu. Hanya, FKPP meminta diberi perpanjangan waktu pengosongan kios. Target yang diberikan saat ini sampai akhir tahun. "Jadi tuntutan kami, pertama kami minta perpanjangan waktu sampai direncanakan (pembangunan) JPG di 2024 sesuai informasi sebelumnya yang kami terima secara verbal. Jika itu terjadi, kami sudah sepakat siap pindah tanpa ada kompensasi apa pun. Siap hitam di atas putih," jelasnya.

Namun jika tidak, mereka meminta sampai waktu menabung mencukupi minimal 15 hari setelah Idul Fitri, Mei 2023. Dengan kompensasi relokasi seadanya di mana pun. Ini karena pandemi Covid-19 cukup mengontrakai ekonomi mereka, sehingga banyak yang sudah terlanjur meminjam modal ke beberapa lembaga keuangan dan kebanyakan selesai tahun 2024. "Ya, secara tidak langsung ini dasar acuan kami, karena kami berusaha buruh suntikan dana karena desakan pandemi Covid-19," terangnya.

Terkait hal ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan kalangan DPRD Kota Jogja dan provinsi awal Oktober lalu, untuk memintra menjembatani solusi terbaik, agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Demikian pula sudah memberi surat ke Keraton Jogja atas yang memberi *dawuh* pengosongan itu untuk keperluan negosiasi, diskusi, dan audiensi. Namun sampai saat ini belum ada tanggapan apa pun. "Kami takutnya ada diskomunikasi antara bawahan dan atasan, karena sampai keluar statemen seperti itu. Kami tetap minta ada kebijakan dari pemerintah," tandasnya.

Sebelumnya, Pj Wali Kota Jogja Sumadi mengatakan, pemkot sudah menyampaikan relokasi pedagang Jalan Perwakilan sejak lama, yakni sekitar tiga bulan lalu. Relokasi dilakukan karena kawasan itu akan menjadi pintu masuk Jogja Planning Gallery (JPG).

Sebab Malioboro nantinya akan benar-benar diterapkan sebagai kawasan pedesterian. Sehingga arus lalu lintas akan dialihkan di sirip-sirip kawasan Malioboro. "Karenanya kami beri waktu bagi pedagang Jalan Perwakilan sebulan ke depan untuk persiapan pindah. Memang sampai akhir tahun karena DED (detail engineering design) *karo* dimulai 2023," katanya.

Pemkot dalam hal ini tidak akan memberikan perpanjangan waktu relokasi. Apalagi para pedagang meminta relokasi dilakukan pada 2024 bersamaan dengan pembangunan JPG di kawasan Teras Malioboro 2 dan kantor DPRD DIJ yang akan dimulai pada tahun itu.

"Ya memang sudah lama *kok* (pedagang harus pindah) *kan* sudah kita beri waktu dari dulu. Mereka *ngenyang* (menawar) *ki sesuk* (besok) sampai dibangunnya JPG itu," ujarnya.

Sumadi menambahkan, para pedagang Jalan Perwakilan sebenarnya sudah mengakui mereka tidak berhak berjualan di Jalan Perwakilan. Karenanya, pemkot meminta mereka segera pindah dari kawasan itu. Tak asal menggusur, pemkot mengklaim memberikan sejumlah pilihan relokasi bagi pedagang Jalan Perwakilan. Di antaranya di Pasar Beringharjo lantai 2. Selain itu Pemkot memberikan pilihan relokasi di Pasar Klitikan, Kuncen.

"Kebijakan pelaksanaannya *kan* di kota. Silakan pedagang bicarakan dengan pemkot," katanya.

Aji menjelaskan JPG memang baru akan dibangun 2024 setelah Teras Malioboro 2 dipindah. Pemprov baru menyiapkan pembelian tanah untuk relokasi pedagang Teras Malioboro 2 ke tempat yang baru. "DRPD juga belum disiapkan kepindahannya. Jadi kita siapkan semuanya sebelum penataan 2024, termasuk yang kawasan Jalan Perwakilan itu," tambahnya. **(wia/laz/fj)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005